

ABSTRAK

Penelitian ini berlatar belakang budaya hukum (*legal culture*) masyarakat terhadap perspektif lingkungan hidup yang masih rendah menjadi pemicu tindak pidana pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Wonosobo. Problematika dalam tesis ini berangkat dari pertanyaan (1) Bagaimana penegakan hukum pidana pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Wonosobo? (2) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penegakan hukum pidana pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Wonosobo?(3) Bagaimanakah seharusnya penegakan hukum pidana pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Wonosobo di masa mendatang?

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis dan pengambilan data melalui wawancara bebas terpimpin. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama penegakan hukum pidana PETI mengacu kepada Norma hukum pidana dalam UU Minerba yang memuat asas legalitas pada pasal 158 dan asas kulpabilitas (kesalahan) berupa tiadanya izin usaha pertambangan. Adapun prinsip hukum berupa Fiksi Hukum, menegaskan bahwa setiap orang atau masyarakat tidak dapat menghindari dari delik pidana meskipun pihak tersebut belum mengerti hukum perizinan penambangan mineral dan batu bara. Kedua faktor-faktor yang mempengaruhi PETI meliputi Instrumen hukum berisi tentang semua dokumen yang bernilai hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, komponen kelembagaan yang mencakup sarana dan prasarana serta semua aspek keorganisasian, sumberdaya manusia dan kepemimpinan, sistem informasi dan komunikasi, komponen budaya hukum, pendidikan hukum, dan sosialisasi hukum. *Legal Substance* berupa UU Minerba sudah memadai dalam memandu penegakan hukum pidana PETI dan inti dari faktor budaya hukum (*legal culture*) dalam memandang etika lingkungan menjadi akar segala permasalahan PETI. Ketiga penegakan hukum tindak pidana PETI di masa yang akan datang perlu mengakomodir prinsip-prinsip penegakan hukum yang berbasis pada asesmen kasus, evaluasi kasus berbasis *value for money* dan meningkatkan literasi hukum terutama prinsip Fiksi Hukum.

Kata Kunci: Penegakan hukum, tindak pidana PETI, Fiksi Hukum

ABSTRACT

This study has a background in the legal culture of the community against an environmental perspective which is still low, which triggers illegal mining (PETI) criminal acts in Wonosobo District. The problems in this thesis depart from the question (1) How is the enforcement of mining licenses without permits (PETI) in Wonosobo District? (2) What factors influence the enforcement of mining permits without permits (PETI) in Wonosobo District?

This research is descriptive qualitative with the Sociological Juridical approach and data collection through guided free interviews. The sampling technique used in this study is purposive sampling.

The results showed that the first criminal law enforcement of PETI referred to the criminal law norms in the Minerba Law which contained the principle of legality in article 158 and the principle of liability (error) in the form of the absence of a mining business license. The legal principle in the form of Legal Fiction, affirms that every person or community cannot avoid criminal offenses even though the party does not understand the law of mineral and coal mining licensing. The second factors that affect PETI include legal instruments containing all documents of legal value, both written and unwritten, institutional components that include facilities and infrastructure as well as all aspects of organization, human resources and leadership, information and communication systems, legal cultural components, legal education, and legal socialization. Legal Substance in the form of the Minerba Law is sufficient to guide the enforcement of criminal law on PETI and the core of the legal culture factor in viewing environmental ethics as the root of all the problems of PETI. Third, future enforcement of criminal law on crime of illegal logging needs to accommodate the principles of law enforcement based on case assessments, value for money-based case evaluations and improving legal literacy, especially the principle of legal fiction.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Act, Legal Fiction